

Pengembangan Media Informasi Digital untuk Transparansi Publik

Al Qoyim¹, Muawan Bisri², Ranto Siswanto³

^{1,2,3}Program Studi Informatika, Universitas Indonesia Mandiri

e-mail: alqoyim@uimandiri.ac.id; ributjulianto@uimandiri.ac.id; rantosiswanto@uimandiri.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan media informasi digital sebagai sarana peningkatan transparansi publik pada lembaga mitra. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, keterbatasan media informasi yang terstruktur, serta rendahnya efektivitas pembaruan informasi secara berkala. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, analisis kebutuhan, perancangan media, pengembangan media, pelatihan, implementasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media informasi digital yang dikembangkan mampu membantu mitra dalam menyampaikan informasi secara lebih sistematis, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain menghasilkan platform informasi digital, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas mitra dalam mengelola dan memperbarui konten secara mandiri. Penggunaan media informasi digital terbukti mendukung keterbukaan informasi lembaga, meningkatkan efisiensi komunikasi publik, serta memperbaiki kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pengembangan media informasi digital dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung transparansi publik dan penguatan tata kelola informasi pada lembaga mitra.

Kata Kunci: media informasi digital, transparansi publik, pengabdian kepada masyarakat, layanan informasi, transformasi digital

ABSTRACT

This community service activity aimed to develop digital information media as a means of improving public transparency in partner institutions. The problems faced by the partner included the suboptimal delivery of information to the public, limited availability of structured information media, and the low effectiveness of periodic information updates. To address these problems, the activity was carried out using a participatory and applicable approach through several stages, namely preparation, needs analysis, media design, media development, training, implementation, and evaluation. The results showed that the developed digital information media was able to assist the partner in delivering information in a more systematic, faster, and more accessible manner to the public. In addition to producing a digital information platform, this activity also improved the partner's capacity to manage and update content independently. The use of digital information media proved to support institutional information openness, increase the efficiency of public communication, and improve the quality of information services to the community. Therefore, the development of digital information media can be an effective solution to support public transparency and strengthen information governance in partner institutions.

Keywords: digital information media, public transparency, community service, information services, digital transformation

1. PENDAHULUAN

Transparansi publik menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi tidak lagi dipahami sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi institusi, dan mendorong pengawasan sosial yang sehat. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan transparansi semakin erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dan lembaga publik dalam menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Perkembangan transformasi digital telah mengubah cara institusi publik menyampaikan informasi kepada warga. Media informasi yang sebelumnya bersifat konvensional, seperti papan pengumuman, selebaran, atau layanan tatap muka, kini bergeser menuju platform digital yang lebih dinamis dan interaktif. Pergeseran ini membuka peluang besar bagi lembaga publik untuk menyampaikan data, program, anggaran, layanan, dan capaian kinerja secara lebih luas dan efisien. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menegaskan bahwa pemerintahan digital yang berpusat pada pengguna mampu memperkuat kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan keterbukaan sektor publik (OECD, 2023).

Media informasi digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai sarana penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan situs web resmi, dashboard informasi, media sosial institusional, aplikasi layanan publik, serta sistem informasi berbasis mobile memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara real time tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam kerangka pemerintahan digital global, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan penyediaan layanan informasi daring, partisipasi elektronik, dan aksesibilitas sebagai indikator penting dalam pembangunan e-government (United Nations, 2024).

Keterbukaan informasi publik melalui media digital memiliki relevansi yang semakin tinggi pada era masyarakat informasi. Warga kini tidak hanya menuntut layanan yang cepat, tetapi juga menuntut kejelasan proses, keterlacakan kebijakan, serta keterbukaan penggunaan sumber daya publik. Kondisi ini menuntut institusi pemerintah untuk menghadirkan media informasi yang tidak sekadar informatif, tetapi juga transparan, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan warga secara spesifik. Bank Dunia menilai bahwa transformasi layanan digital sektor publik berkontribusi pada peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan peluang inovasi kelembagaan (World Bank, 2025a).

Masalah yang kerap muncul di berbagai lembaga publik adalah keterbatasan media komunikasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka dan berkelanjutan. Informasi sering tersebar di berbagai kanal yang tidak terintegrasi, sulit diperbarui, atau disajikan dalam format yang tidak ramah pengguna. Akibatnya, masyarakat mengalami hambatan untuk memperoleh informasi yang valid dan terkini. Hambatan semacam ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan memperbesar kesenjangan informasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat yang dilayani.

Pengembangan media informasi digital menjadi salah satu solusi yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Media digital yang dirancang dengan baik memungkinkan penyajian informasi yang lebih sistematis, visual, dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok pengguna. Selain itu, integrasi fitur pencarian, pengelompokan informasi, notifikasi pembaruan, serta tampilan berbasis perangkat bergerak dapat memperluas jangkauan akses masyarakat. Penelitian tentang transparansi digital menunjukkan bahwa persepsi atas keterbukaan informasi berhubungan dengan tingkat kebermanfaatan portal dan aplikasi pemerintah bagi pengguna (Meijer et al., 2023).

Kualitas media informasi digital juga dipengaruhi oleh prinsip desain yang mendukung transparansi. Informasi yang lengkap tetapi sulit dipahami tidak akan efektif dalam mendorong keterbukaan publik. Demikian pula, platform yang menarik secara visual tetapi tidak konsisten diperbarui akan kehilangan fungsinya sebagai sumber informasi terpercaya. Penelitian mengenai desain transparansi digital dalam pemerintahan menekankan pentingnya prinsip kejelasan, aksesibilitas, keterlacakan, kemutakhiran, dan relevansi konten agar media informasi benar-benar mendukung transparansi kelembagaan (Grimmelikhuijsen et al., 2020).

Konteks pengabdian kepada masyarakat memberikan ruang yang strategis untuk mendorong peningkatan kapasitas lembaga atau komunitas dalam memanfaatkan teknologi digital bagi kepentingan publik. Melalui kegiatan pengabdian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyedia gagasan

konseptual, tetapi juga sebagai mitra transformasi yang membantu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan media informasi digital sesuai kebutuhan lapangan. Pendekatan ini penting karena setiap institusi memiliki karakteristik pengguna, kapasitas sumber daya, dan kebutuhan informasi yang berbeda.

Kebutuhan terhadap media informasi digital yang transparan semakin nyata ketika masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat, namun tidak selalu akurat. Dalam situasi seperti ini, kanal informasi resmi yang dikelola secara profesional menjadi instrumen penting untuk mencegah disinformasi sekaligus memperkuat literasi publik. Lembaga publik yang mampu menyajikan informasi secara terbuka, konsisten, dan terverifikasi akan lebih mudah membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih sehat.

Pengembangan media informasi digital juga berkaitan dengan agenda open government dan pemanfaatan open data. Informasi publik yang tersedia secara digital memberi peluang bagi masyarakat, akademisi, media, dan komunitas sipil untuk melakukan pengawasan, analisis, serta kolaborasi berbasis data. Kajian sistematis mengenai open government data menunjukkan bahwa keterbukaan data memiliki potensi besar bagi inovasi, tata kelola, dan nilai sosial, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek kualitas data, pemanfaatan, dan keberlanjutan sistem (Attard et al., 2022).

Sudut pandang kebermanfaatannya publik perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan media informasi digital. Sebuah sistem informasi yang baik tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat sebagai pengguna akhir. Karena itu, proses pengembangan perlu mempertimbangkan pengalaman pengguna, struktur navigasi, bahasa yang komunikatif, serta akses bagi kelompok rentan. United Nations (2024) menegaskan bahwa pembangunan pemerintahan digital yang inklusif harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan dan informasi.

Upaya pengembangan media informasi digital untuk transparansi publik juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan digital global yang menekankan infrastruktur publik digital, pertukaran data yang terpercaya, dan pelayanan yang terintegrasi. Kehadiran teknologi digital dapat menjadi enabler bagi transparansi apabila didukung tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang memadai, dan komitmen kelembagaan untuk menjaga keterbukaan. Laporan perkembangan digital global dari Bank Dunia menunjukkan bahwa transformasi digital sektor publik semakin dipengaruhi oleh kebutuhan terhadap interoperabilitas, kepercayaan, dan pemanfaatan teknologi secara strategis (World Bank, 2025b).

Kegiatan pengabdian ini diposisikan sebagai bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan mitra terkait penyediaan informasi publik. Fokus pengembangan tidak hanya terletak pada pembuatan media digital sebagai produk teknologi, tetapi juga pada penguatan fungsi komunikasi publik, peningkatan kapasitas pengelola, serta penciptaan mekanisme pembaruan informasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil kegiatan diharapkan tidak berhenti pada keluaran teknis, melainkan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola informasi.

Nilai penting dari pengembangan media informasi digital terletak pada kemampuannya untuk mempertemukan aspek teknologi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Media digital yang dirancang secara tepat dapat menjadi instrumen transformasi kelembagaan, karena mendorong budaya kerja yang lebih terbuka, terdokumentasi, dan terukur. OECD (2025) menunjukkan bahwa kematangan pemerintahan digital berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah membangun fondasi transformasi digital yang koheren, berpusat pada manusia, dan mendukung kepercayaan publik.

Penelitian dan praktik terdahulu memperlihatkan bahwa transparansi digital tidak terjadi secara otomatis hanya karena sebuah lembaga telah memiliki situs web atau aplikasi. Transparansi memerlukan desain

informasi yang baik, komitmen pembaruan konten, integrasi data, dan orientasi pada kebutuhan warga. Oleh sebab itu, pengabdian dengan tema pengembangan media informasi digital untuk transparansi publik menjadi relevan untuk menjawab tantangan layanan informasi pada era digital, sekaligus mendukung terwujudnya lembaga yang lebih terbuka, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi publik merupakan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, transparansi menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta penggunaan sumber daya publik dapat diketahui dan diawasi oleh warga. Keterbukaan informasi publik juga berkaitan erat dengan akuntabilitas, karena masyarakat memiliki hak untuk memahami bagaimana lembaga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Transparansi yang baik pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara layanan.

Konsep transparansi publik berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Keterbukaan tidak lagi dipahami sebagai penyampaian informasi satu arah, tetapi sebagai upaya menciptakan hubungan timbal balik antara institusi dan masyarakat. Informasi yang dipublikasikan harus disajikan secara jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam hal ini, transparansi tidak hanya bergantung pada jumlah informasi yang disampaikan, tetapi juga pada kualitas, relevansi, serta kemudahan akses terhadap informasi tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam praktik transparansi publik. Media digital memungkinkan lembaga untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat, luas, dan efisien dibandingkan media konvensional. Kehadiran situs web, media sosial, aplikasi layanan, dan sistem informasi berbasis internet telah membuka peluang baru dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Media digital juga memungkinkan pembaruan informasi secara berkala, sehingga publik dapat memperoleh data yang lebih aktual dan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Media informasi digital adalah sarana penyampaian informasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung komunikasi antara penyedia informasi dan pengguna. Dalam konteks lembaga publik, media ini dapat berupa portal informasi, website resmi, aplikasi mobile, papan informasi digital, maupun akun media sosial institusional. Fungsi utama media informasi digital bukan hanya menampilkan informasi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mencari, memahami, dan menggunakan informasi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan media informasi digital harus mempertimbangkan aspek isi, desain, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna.

Penggunaan media informasi digital dalam pelayanan publik memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, media digital dapat memperluas jangkauan informasi karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Kedua, media digital memungkinkan efisiensi biaya dan waktu dalam proses penyebaran informasi. Ketiga, media digital mendukung penyajian informasi dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, infografik, dan data interaktif. Keempat, media digital memberikan peluang bagi lembaga untuk membangun interaksi yang lebih responsif dengan masyarakat, baik melalui fitur kontak, komentar, formulir pengaduan, maupun sistem umpan balik.

Transparansi melalui media digital juga berkaitan dengan konsep e-government. E-government dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, serta hubungan dengan masyarakat. Salah satu dimensi penting dari e-

government adalah keterbukaan informasi. Melalui sistem digital, lembaga publik dapat menampilkan informasi mengenai layanan, prosedur, biaya, jadwal, program, dan laporan kegiatan secara lebih sistematis. Dengan demikian, implementasi e-government tidak hanya berorientasi pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola yang transparan.

Selain e-government, konsep good governance juga menjadi landasan penting dalam pengembangan media informasi digital. Good governance menekankan adanya prinsip partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dalam perspektif good governance berarti adanya keterbukaan institusi dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan. Apabila media informasi digital dikembangkan secara tepat, maka media tersebut dapat menjadi alat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance secara lebih nyata.

Kualitas media informasi digital dipengaruhi oleh beberapa unsur penting. Unsur pertama adalah kualitas informasi, yang mencakup keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan kemutakhiran isi. Unsur kedua adalah kualitas sistem, yaitu kemudahan penggunaan, kecepatan akses, stabilitas, dan keamanan platform. Unsur ketiga adalah kualitas tampilan, yang meliputi struktur menu, keterbacaan teks, pemilihan visual, dan kemudahan navigasi. Unsur keempat adalah keberlanjutan pengelolaan, yaitu kemampuan lembaga dalam memperbarui konten dan menjaga media tetap aktif serta relevan. Keempat unsur tersebut menentukan sejauh mana media digital dapat benar-benar mendukung keterbukaan informasi publik.

Aksesibilitas menjadi komponen yang sangat penting dalam pengembangan media informasi digital. Informasi yang tersedia secara daring belum tentu dapat diakses dengan baik oleh seluruh kelompok masyarakat. Faktor bahasa, literasi digital, perangkat yang digunakan, kualitas jaringan internet, dan kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus harus diperhatikan dalam desain media. Oleh sebab itu, pengembangan media informasi digital harus bersifat inklusif. Media yang mudah diakses akan meningkatkan peluang masyarakat untuk memperoleh informasi secara setara dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih adil.

Dalam praktiknya, masih banyak lembaga yang menghadapi kendala dalam mewujudkan transparansi publik berbasis digital. Sebagian lembaga telah memiliki website atau media sosial, tetapi pengelolaannya belum optimal. Informasi sering kali tidak diperbarui, struktur konten tidak tertata, dan tampilan media belum ramah pengguna. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya perencanaan komunikasi publik, dan minimnya pemahaman terhadap kebutuhan pengguna juga menjadi faktor penghambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan media digital saja belum cukup; yang lebih penting adalah bagaimana media tersebut dirancang dan dikelola secara efektif.

Pengembangan media informasi digital dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk intervensi yang bersifat aplikatif dan solutif. Perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian memiliki peran dalam membantu mitra mengidentifikasi masalah komunikasi publik, merancang solusi digital yang sesuai, serta meningkatkan kapasitas pengelola informasi. Pendekatan ini menempatkan teknologi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memperkuat layanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengabdian tidak hanya diukur dari terbentuknya produk digital, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan mitra dalam memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Kerangka pemikiran dalam kegiatan ini berangkat dari asumsi bahwa transparansi publik dapat ditingkatkan melalui pengembangan media informasi digital yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan karakteristik lembaga. Media yang dikembangkan harus mampu menjawab persoalan akses informasi, memperjelas alur komunikasi, dan menyajikan konten yang relevan bagi masyarakat. Jika

media informasi digital dikelola secara konsisten, maka akan tercipta aliran informasi yang lebih terbuka, peningkatan kepercayaan publik, serta penguatan citra kelembagaan sebagai penyelenggara layanan yang akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa pengembangan media informasi digital memiliki dasar teoretis yang kuat dalam konsep transparansi publik, e-government, dan good governance. Media digital yang berkualitas, mudah diakses, dan dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian dengan fokus pengembangan media informasi digital untuk transparansi publik relevan untuk dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas komunikasi dan layanan informasi pada lembaga mitra.

3. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif yang berfokus pada pengembangan media informasi digital untuk mendukung transparansi publik pada lembaga mitra. Pendekatan partisipatif dipilih agar seluruh tahapan kegiatan tidak hanya bertumpu pada tim pelaksana, tetapi juga melibatkan mitra secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, perancangan media, implementasi, hingga evaluasi. Sementara itu, pendekatan aplikatif digunakan agar solusi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan sesuai kondisi lapangan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Sasaran kegiatan ini adalah lembaga mitra yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyebaran informasi publik melalui media digital. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi keterbatasan media informasi yang terstruktur, kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, belum tersedianya platform digital yang mudah diakses, serta rendahnya efektivitas pembaruan informasi secara berkala. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian diarahkan untuk menghasilkan media informasi digital yang informatif, mudah digunakan, dan mampu mendukung keterbukaan informasi secara lebih sistematis.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu tahap persiapan, analisis kebutuhan, perancangan media, pengembangan media, sosialisasi dan pelatihan, implementasi, serta evaluasi. Tahapan ini disusun agar proses pengabdian berjalan terarah, terukur, dan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Setiap tahap dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan masukan dari mitra sebagai pengguna utama dari media informasi digital yang dikembangkan.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pihak mitra untuk menyepakati tujuan kegiatan, ruang lingkup pelaksanaan, jadwal, serta pembagian peran selama proses pengabdian. Pada tahap ini juga dilakukan observasi awal terhadap kondisi media informasi yang telah dimiliki mitra, baik dalam bentuk media cetak maupun media digital yang sudah berjalan. Hasil observasi awal digunakan sebagai dasar untuk memahami kondisi eksisting serta mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan melalui kegiatan pengabdian.

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kebutuhan informasi mitra dan karakteristik pengguna media. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengelola lembaga, petugas layanan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Diskusi dilakukan untuk menggali jenis informasi yang paling dibutuhkan masyarakat, hambatan dalam penyampaian informasi, serta harapan mitra terhadap media digital yang akan dikembangkan. Observasi digunakan untuk melihat langsung alur penyampaian informasi yang berjalan, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap berbagai bahan

informasi yang telah dimiliki mitra.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap berikutnya adalah perancangan media informasi digital. Pada tahap ini tim pengabdian menyusun konsep media yang akan dikembangkan, meliputi struktur menu, jenis konten, tampilan antarmuka, serta alur pengelolaan informasi. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan akses, kejelasan informasi, kesederhanaan navigasi, dan kesesuaian dengan identitas lembaga mitra. Media dirancang agar dapat menampilkan informasi profil lembaga, layanan, program kegiatan, pengumuman, dokumentasi, serta informasi lain yang relevan bagi masyarakat.

Tahap pengembangan media dilakukan dengan merealisasikan desain yang telah disusun ke dalam bentuk platform digital yang siap digunakan. Pengembangan dapat berupa website, portal informasi, atau media digital lain yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan halaman utama, menu informasi, fitur publikasi konten, galeri dokumentasi, formulir kontak, serta fitur pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian tampilan agar media dapat diakses melalui perangkat komputer maupun telepon pintar. Pengembangan media juga memperhatikan aspek efisiensi penggunaan agar mudah dikelola oleh operator dari pihak mitra.

Setelah media selesai dikembangkan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap uji coba terbatas. Uji coba dilakukan untuk mengetahui fungsi media, ketepatan tampilan, kemudahan navigasi, serta kesesuaian isi informasi dengan kebutuhan mitra. Pada tahap ini tim pengabdian bersama mitra memeriksa setiap fitur yang tersedia, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kendala teknis maupun kendala isi. Uji coba ini penting dilakukan agar media yang dihasilkan benar-benar siap untuk digunakan dalam kegiatan layanan informasi publik.

Tahap sosialisasi dan pelatihan dilakukan setelah media dinyatakan layak digunakan. Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan media informasi digital kepada pihak mitra dan calon pengguna. Pelatihan diberikan kepada pengelola atau operator yang ditunjuk oleh mitra agar mampu mengoperasikan media secara mandiri. Materi pelatihan mencakup cara masuk ke sistem, mengunggah dan memperbarui informasi, mengelola tampilan konten, serta melakukan pemeliharaan sederhana. Dengan adanya pelatihan, mitra diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengelola keberlanjutan media yang telah dikembangkan.

Tahap implementasi merupakan proses penerapan media informasi digital dalam aktivitas nyata lembaga mitra. Pada tahap ini media mulai digunakan sebagai sarana utama atau sarana pendukung dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya disampaikan secara terbatas mulai diunggah dan dipublikasikan secara lebih terbuka melalui platform digital. Tim pengabdian tetap melakukan pendampingan selama masa awal implementasi untuk memastikan bahwa media berjalan dengan baik dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengabdian dan kebermanfaatan media informasi digital yang telah dikembangkan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara lanjutan, serta penyebaran angket kepada pihak mitra atau pengguna. Aspek yang dievaluasi meliputi kesesuaian media dengan kebutuhan mitra, kemudahan penggunaan, kualitas tampilan, kelengkapan informasi, serta manfaat media dalam mendukung transparansi publik. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan sekaligus menjadi dasar rekomendasi pengembangan lebih lanjut.

Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini meliputi beberapa aspek. Pertama, tersedianya media informasi digital yang dapat digunakan oleh mitra. Kedua, meningkatnya kemampuan mitra dalam mengelola dan memperbarui informasi secara mandiri. Ketiga, meningkatnya keterbukaan informasi lembaga kepada

masyarakat melalui media digital. Keempat, adanya respons positif dari pengguna terhadap kemudahan akses dan kejelasan informasi yang disajikan. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan pengabdian telah mencapai tujuan yang direncanakan.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini menekankan bahwa pengembangan media informasi digital bukan hanya proses teknis pembuatan platform, tetapi juga proses pemberdayaan mitra dalam membangun sistem komunikasi publik yang lebih efektif. Keterlibatan aktif mitra pada setiap tahapan menjadi faktor penting agar media yang dihasilkan sesuai kebutuhan, mudah dioperasikan, dan berkelanjutan. Dengan metode pelaksanaan yang sistematis tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas transparansi publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sebuah media informasi digital yang dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi pada lembaga mitra. Media yang dikembangkan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi publik yang lebih terstruktur, mudah diakses, dan lebih efektif dibandingkan pola penyampaian informasi sebelumnya yang masih bersifat terbatas. Kehadiran media digital ini menjadi solusi atas permasalahan mitra dalam menyediakan informasi yang cepat, jelas, dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, kondisi awal mitra menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih dilakukan melalui cara-cara konvensional, seperti komunikasi langsung, penyampaian lisan, media cetak sederhana, atau pesan melalui aplikasi komunikasi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan informasi sering tidak tersampaikan secara merata, sulit diakses kembali, dan tidak memiliki sistem pembaruan yang jelas. Dari hasil observasi dan diskusi awal, diketahui bahwa mitra membutuhkan media informasi yang mampu memusatkan berbagai jenis informasi dalam satu platform digital yang mudah dikelola.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim pengabdian mengembangkan media informasi digital yang memuat beberapa komponen utama, yaitu profil lembaga, informasi layanan, agenda kegiatan, pengumuman, dokumentasi, dan kontak atau saluran komunikasi. Penyusunan konten dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi publik yang paling sering dibutuhkan masyarakat. Penempatan menu dan struktur halaman disusun secara sederhana agar pengguna dapat menemukan informasi dengan cepat tanpa harus melalui proses pencarian yang rumit. Hasil pengembangan ini menunjukkan bahwa media digital dapat dirancang sesuai kebutuhan mitra dengan tetap memperhatikan prinsip kemudahan akses dan keterbacaan informasi.

Pada tahap implementasi, media informasi digital berhasil dioperasikan dan digunakan oleh pihak mitra sebagai sarana penyebaran informasi. Pengelola mitra mulai mengunggah informasi secara berkala, termasuk pengumuman kegiatan, layanan yang tersedia, dan dokumentasi aktivitas lembaga. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan dari sisi tata kelola informasi, karena informasi yang sebelumnya tersebar dan tidak terdokumentasi kini dapat dihimpun dalam satu media yang lebih sistematis. Selain itu, media yang dikembangkan juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke lokasi lembaga.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media informasi digital yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dalam proses penyampaian informasi. Sebelum adanya media ini, pihak mitra harus menyampaikan informasi secara berulang kepada banyak pihak melalui saluran yang berbeda. Setelah media digital digunakan, informasi dapat dipublikasikan satu kali dan kemudian diakses oleh masyarakat

kapan saja sesuai kebutuhan. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban kerja pengelola, tetapi juga mempercepat alur komunikasi antara lembaga dan masyarakat.

Dari sisi kualitas pelayanan informasi, media digital yang dikembangkan memberikan dampak positif terhadap kejelasan dan keteraturan informasi. Informasi yang tersedia menjadi lebih mudah dipahami karena disusun dalam kategori yang jelas dan ditampilkan secara lebih rapi. Keberadaan fitur pengumuman, profil, layanan, dan dokumentasi menjadikan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas dan fungsi lembaga. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi media informasi tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan mutu penyajiannya.

Pelaksanaan pelatihan kepada operator atau pengelola mitra juga memberikan hasil yang signifikan. Pihak mitra menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola media informasi digital secara mandiri, mulai dari memperbarui konten, menambahkan informasi baru, hingga mengatur tampilan sederhana pada halaman tertentu. Peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu hasil penting dalam kegiatan pengabdian, karena keberlanjutan media informasi digital sangat bergantung pada kemampuan pengelola lokal dalam mengoperasikannya setelah kegiatan selesai.

Selain menghasilkan media digital sebagai luaran utama, kegiatan ini juga mendorong perubahan pola komunikasi lembaga dengan masyarakat. Jika sebelumnya informasi bersifat tertutup atau hanya diketahui oleh kalangan tertentu, maka setelah adanya media digital proses penyampaian informasi menjadi lebih terbuka. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui program, layanan, dan kegiatan lembaga. Dengan demikian, media informasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi publik.

Berdasarkan hasil evaluasi, masyarakat atau pengguna merespons secara positif keberadaan media informasi digital yang telah dikembangkan. Pengguna menilai bahwa informasi menjadi lebih mudah diperoleh, lebih jelas, dan lebih cepat diakses. Kemudahan akses melalui perangkat telepon pintar juga menjadi nilai tambah, karena sebagian besar pengguna lebih sering mengakses informasi melalui perangkat bergerak. Respons positif ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan dasar pengguna, terutama dalam hal kemudahan, kecepatan, dan kejelasan informasi.

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan media informasi digital dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah keterlibatan aktif mitra sejak tahap awal perencanaan hingga implementasi. Keterlibatan ini memungkinkan media yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Faktor kedua adalah penyederhanaan desain media, sehingga memudahkan baik bagi pengelola maupun pengguna. Faktor ketiga adalah adanya pelatihan dan pendampingan yang membantu mitra memahami fungsi media serta cara pengelolaannya. Ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam menghasilkan media yang fungsional dan berkelanjutan.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan konsep transparansi publik yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Melalui media informasi digital, lembaga mitra dapat menyampaikan informasi secara lebih terbuka, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh warga. Kondisi ini memperkuat fungsi media digital sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga dan masyarakat. Keterbukaan informasi yang dikelola secara baik juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Dari perspektif implementasi teknologi, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengembangan media informasi digital tidak harus selalu menggunakan sistem yang rumit. Media yang sederhana, tetapi relevan dengan kebutuhan pengguna, justru lebih mudah diterapkan dan dikelola secara berkelanjutan. Temuan ini penting karena banyak lembaga mitra, khususnya pada tingkat lokal, memiliki keterbatasan

sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Oleh sebab itu, pendekatan pengembangan yang sederhana, tepat guna, dan mudah dioperasikan menjadi pilihan yang lebih efektif dalam konteks pengabdian kepada masyarakat.

Walaupun demikian, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan kemampuan teknis awal dari pengelola, kebutuhan penyesuaian konten agar sesuai dengan karakteristik lembaga, serta perlunya komitmen untuk memperbarui informasi secara konsisten. Beberapa pengguna juga masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pola akses informasi secara digital. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pengembangan media digital bukan hanya persoalan penyediaan platform, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan budaya kerja informasi di lingkungan mitra.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian melakukan pendampingan secara bertahap serta memberikan panduan pengelolaan media kepada mitra. Pendekatan ini terbukti membantu pengelola dalam memahami alur kerja sistem dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mengoperasikan media digital. Selain itu, pemilihan fitur yang tidak terlalu kompleks membantu proses adaptasi menjadi lebih cepat. Upaya ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pengabdian sangat dipengaruhi oleh strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas mitra.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan kegiatan ini menegaskan bahwa pengembangan media informasi digital mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi publik pada lembaga mitra. Media yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana pembenahan tata kelola komunikasi publik yang lebih terbuka, efektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya media informasi digital, lembaga mitra memiliki instrumen yang lebih memadai untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, jelas, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengembangan media informasi digital untuk transparansi publik telah memberikan hasil yang positif bagi lembaga mitra. Media informasi digital yang dikembangkan mampu menjadi sarana penyampaian informasi yang lebih terstruktur, mudah diakses, dan lebih efektif dibandingkan dengan metode penyampaian informasi sebelumnya yang masih bersifat konvensional. Kehadiran media ini membantu mitra dalam menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat secara lebih terbuka dan sistematis.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pengembangan media informasi digital tidak hanya menghasilkan luaran berupa platform informasi, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas mitra dalam mengelola informasi secara mandiri. Melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelatihan, implementasi, dan evaluasi, mitra memperoleh pengalaman langsung dalam mengoperasikan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Hal ini menjadi aspek penting karena keberlanjutan media sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengelola dalam memperbarui dan memanfaatkan sistem yang telah dibangun.

Media informasi digital yang dihasilkan terbukti mendukung peningkatan transparansi publik karena memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai profil lembaga, layanan, kegiatan, pengumuman, dan dokumentasi secara lebih cepat dan jelas. Dengan tersedianya informasi dalam satu platform digital, proses komunikasi antara lembaga dan masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi yang tepat dalam mendukung keterbukaan informasi pada lembaga mitra.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa pengembangan media informasi digital merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola informasi publik. Media digital yang

sederhana, tepat guna, dan mudah dikelola dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan informasi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Oleh karena itu, pengembangan media informasi digital perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan lembaga yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2022). Open government data: A systematic literature review of empirical research. *Electronic Markets*. <https://doi.org/10.1007/s12525-022-00582-8>
- Grimmelikhuijsen, S., Meijer, A., & Feeney, M. K. (2020). Design principles for creating digital transparency in government. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101491>
- Meijer, A., Hartog, M., & Gardeniers, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *The Journal of Strategic Information Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2023.101800>
- OECD. (2023). *2023 OECD Digital Government Index*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Government at a glance 2025: Digital government index*. OECD Publishing.
- OECD. (2026). *Digital government*. OECD.
- United Nations. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2025a). *Digital government*. World Bank.
- World Bank. (2025b). *Digital progress and trends report*. World Bank.
- World Bank. (2025c). *GovTech Maturity Index 2025 update*. World Bank.

Abdi Akommedia : Jurnal Pengabdian Masyarakat

ISSN: 3025-8103

Vol. 1, No. 2, Juni 2023